



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2059, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten  
Boalemo. Kabupaten Gorontalo Utara.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN  
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOALEMO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Gorontalo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Kabupaten Boalemo adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo .
3. Kabupaten Gorontalo Utara adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.
4. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

### Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo dimulai dari:

Pertigaan batas antara Kabupaten Boalemo dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo yang ditandai oleh TK.01A dengan Koordinat  $00^{\circ} 54' 06.52432''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 04.85005''$  BT yang merupakan Huidu Buloila, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.02 dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 10.90892''$  LU dan  $122^{\circ} 06' 56.41679''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.03 dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 22.95025''$  LU dan  $122^{\circ} 08' 33.41806''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 32.65306''$  LU dan  $122^{\circ} 10' 20.23590''$  BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK.05 dengan koordinat  $00^{\circ} 53' 54.82453''$  LU dan  $122^{\circ} 12' 10.22880''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.06 dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 37.36236''$  LU dan  $122^{\circ} 14' 00.17297''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada pertigaan batas Kabupaten Gorontalo dengan Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo yang ditandai oleh TK.07A dengan koordinat  $00^{\circ} 54' 49,75565''$  LU dan  $122^{\circ} 14' 53,20725''$  BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2014.  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY